



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, BNP2TKI DAN BKKBN)**

Tahun Sidang : 2007 – 2008
Masa Persidangan : IV
Jenis : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Komite Solidaritas Nasional
Sifat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 21 Mei 2008
Waktu : Pukul 11.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : Audensi
Anggota yang hadir : Anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI, Orang ijin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Komite Solidaritas Nasional dibuka pukul 11.55 WIB dan sesuai Tata Tertib Pasal 99 ayat (1) rapat dinyatakan Kuorum dan terbuka untuk umum. Ketua Rapat didampingi oleh Dirjen Pembinaan dan Pengawasan serta Dirjen Perselisihan Hubungan Industrial Depnaker.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Komite Solidaritas Nasional terdiri dari 47 kelompok antara lain :

- Serikat Pekerja PLN	- Serikat Karyawan Perhutani.
- Serikat Pekerja Pembangkit Jawa Bali	- Serikat Pekerja Kertas Leces.
- Persatuan Pegawai Indonesia Power.	- Serikat Pekerja Istaka Karya.
- Serikat Pekerja Angkasa Pura I.	- Serikat Pekerja Industri Soda Ind.
- Serikat Pekerja PD Air Minum.	- Serikat Pekerja DAMRI.
- Serikat Karyawan TELKOM	- Serikat Buruh Indonesia.
- Serikat Pekerja TELKOMSEL	- Federasi SP. BUMN.
- Serikat Pekerja Ikatan Semen Indonesia	- Federasi SP BUMN Strategis.
- Serikat Pekerja Penerbitan,	- Federasi Kimia, Energi dan Pertambangan
	- Federasi Farmasi Kesehatan/R.
	- Federasi SP Metal Indonesia.

<ul style="list-style-type: none"> - Percetakan & Media Indonesia. - Div. Serikat Pekerja AJI Jakarta. - Forum Pegawai Merpati. - Serikat Karyawan Garuda. - Ikatan Awak Kabin Garuda - Serikat Pekerja Nasional - Persatuan Pendidikan Demokrasi. - Serikat Pekerja Terminal Peti Kemas Koja. - Serikat Pekerja Jakarta International Container. - Serikat Pekerja Pelindo II Cab. Tanjung Priok. - Serikat Pekerja Rumah Sakit Pelabuhan. - Serikat Pekerja Multi Terminal Indonesia. - Serikat Pekerja TPT - Serikat Pekerja Pelindo II Cab. Sunda Kelapa. - Serikat Pekerja Bank Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Federasi SP Pariwisata Reformasi. - Aliansi Buruh Menggugat. - Gabungan SP Independen. - ASPEK Indonesia. - Solidaritas Buruh Maritim & Nelayan Indonesia. - FKSP Migas Kalimantan Timur. - LBH Jakarta. - LBH Masyarakat. - Indonesian Labour Foundation. - Trade Union Right Centre. - Public Services International. - Serikat Pekerja Pertamina. - Federasi SP BUMN Bersatu.
--	--

Komite Solidaritas Nasional menuntut penyelamatan asset strategis bangsa dengan cara :

- a. Menghentikan privatisasi sector public dan penjualan BUMN.
- b. Melindungi Serikat Pekerja Sektor Publik dengan menerapkan aturan perundang-undangan secara konsekuen.
- c. Tuntaskan kasus Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I, sebagai akibat dari mogok kerja tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2008.
- d. Bersihkan asset negara dari direksi yang korup.

2. Aspirasi dari Serikat Pekerja Angkasa Pura I.

- a. Sejak tahun 2004 telah memperjuangkan perjanjian kerja bersama yang telah ditandatangani untuk dilaksanakan, tapi Perjanjian Kerja Bersama tidak dilaksanakan oleh pihak manajemen PT. Angkasa Pura I.
- b. Telah menempuh upaya secara internal dengan pihak manajemen, namun menemui kebuntuan, hingga dilanjutkan penyelesaian melalui para pemegang saham hingga difasilitasi oleh Menaker dan Menteri BUMN, namun masalah Serikat Pekerja Angkasa Pura I belum mendapat penyelesaian. Unjuk rasa Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I dilakukan akibat adanya kebuntuan.
- c. Pada tanggal 8 Mei 2008 Komisi IX DPR RI telah melakukan kunjungan lapangan ke PT. Angkasa Pura I, namun setelah Komisi IX DPR RI meninggalkan PT. Angkasa Pura I pihak Manajemen Angkasa Pura I justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 7 orang karyawan. Padahal Komisi IX DPR RI telah meminta kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I agar tidak dilakukan PHK.
- d. Serikat Pekerja mendesak agar janji Komisi IX DPR RI untuk melakukan Raker Gabungan dengan Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan segera dilaksanakan, hal ini sesuai dengan komitmen Komisi IX DPR RI dalam memperjuangkan masalah pekerja/buruh, karena Dirjen PHI dan PPK tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

3. Penjelasan Dirjen PPK dan PHI :

- a. Serikat Pekerja Angkasa Pura I agar menyampaikan secara tertulis/formal mengenai kronologis intimidasi/kriminalisasi yang telah dilakukan oleh pihak manajemen PT. Angkasa Pura I setelah kunjungan lapangan Komisi IX DPR RI ke PT. Angkasa Pura I pada tanggal 8 Mei 2008.
- b. Depnakertrans siap menjadi narasumber dan akan membantu sesuai dengan kewenangan, karena sesuai birokrasi Dirjen PPK dan Dirjen PHI bekerja harus sesuai dengan aturan.

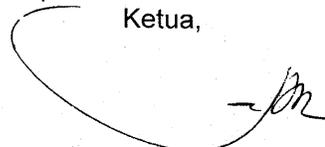
III. TANGGAPAN KOMISI IX DPR RI

1. Dirjen PPK dan PHI agar melakukan pengawasan terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh pihak Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I mengenai dugaan pelanggaran UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 21 Tahun 2000.
2. Komisi IX DPR RI mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PT. Angkasa Pura I dalam rangka menuntut hak-hak pekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja bersama (PKB).
3. Komisi IX DPR RI mendesak agar tindakan kriminalisasi/intimidasi yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Angkasa Pura I dihentikan.
4. Komisi IX DPR RI akan segera mengagendakan rapat kerja gabungan dengan Meneg BUMN dan Menteri Perhubungan.

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Jakarta, 21 Mei 2008

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,



dr. Ribka Tjiptaning

**RANGKUMAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM**

**KOMISI IX DPR RI
dengan
KOMITE SOLIDARITAS NASIONAL**

**Tentang:
Pengaduan Perkembangan Permasalahan Ketenagakerjaan
Di PT Angkasa Pura I**

Rabu 21 Mei 2008

- 1. Komisi IX DPR mendesak Dirjen PPK DEPNAKERTRANS untuk segera melakukan upaya pengawasan ketenagakerjaan menindaklanjuti pengaduan Serikat Pekerja Angkasa Pura I tentang dugaan tindakan pelanggaran UU 13 Tahun 2003 dan pelanggaran UU 21 Tahun 2000 yang dilakukan manajemen PT Angkasa Pura I**
- 2. Komisi IX DPR mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh SP Angkasa Pura I dalam rangka memperjuangkan pemenuhan seluruh hak pekerja PT Angkasa Pura I yang sudah disepakati dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama)**
- 3. Komisi IX DPR RI menyatakan protes keras sekaligus meminta Direksi PT Angkasa Pura I untuk segera menghentikan tindakan intimidasi, kriminalisasi dan segala bentuk tindakan balasan terhadap pengurus dan anggota Serikat Pekerja Angkasa Pura I**
- 4. Komisi IX sepakat perlunya digelar Rapat Kerja Gabungan antara Komisi IX DPR dengan Komisi V DPR RI dengan Komisi VI DPR RI bersama dengan Mennakertrans, Menteri Perhubungan dan Meneg BUMN untuk membahas upaya penyelesaian terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi PT Angkasa Pura I.**

**Jakarta, 21 Mei 2008
Komisi IX DPR RI**



dr. Ribka Tjiptaning